

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM ANGGARAN DANA DESA
DI KECAMATAN NGOMBOL
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2018**

Tesis



Diajukan oleh

RITA PURNAMA

172203713

MAGISTER MANAJEMEN

STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

2019

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ANGGARAN
DANA DESA DI KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO**

TAHUN 2018

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2
Program Studi Magister Manajemen



**Disusun oleh
RITA PURNAMA
172203713**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019**

TESIS

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM ANGGARAN
DANA DESA DI KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018**

Diajukan Oleh

RITA PURNAMA

172203713

Tesis ini telah disetujui

pada tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak

Zulkifli, SE., MM

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, September 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, September 2019

RITA PURNAMA

**STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada :

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha.
2. Prof. Dr. Abdul Halim, MBA., Ak selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Zulkifli, SE., MM selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Suamiku tercinta Agung Wibowo, AP dan putri-putriku Alsa, Nisa dan Alya tersayang atas segala motivasi, dukungan dan doanya.
7. Seluruh informan yang berkenan telah memberikan informasi kepada peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, September 2019

RITA PURNAMA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4. Tujuan penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1. Teori Pemberdayaan Masyarakat	12
2.2. Teori Program Dana Desa	25
2.3. Penelitian Terdahulu	26
2.4. Kerangka Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
3.2. Populasi dan Sampel	31
3.3. Tehnik Pengumpulan Data	32
3.4. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Deskripsi Wilayah Penelitian	36
4.2. Deskripsi Data	38

4.3. Pembahasan	42
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	68
5.1. Simpulan	68
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Dana Desa Kecamatan Ngombol 2016-2018	8
Tabel 4.1. Data Responden Pemberdayaan Masyarakat	39
Tabel 4.2. Data Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018.....	52
Tabel 4.3. Data Penggunaan Dana Desa tahun 2018.	61

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	29
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan.....	38

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

This study aims 1) To analyze the effectiveness of community empowerment through the village funding budget program in Ngombol Subdistrict, Purworejo Regency in 2018. 2) To analyze the factors that support and inhibit community empowerment through the village fund budget program in Purworejo Regency in 2018. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques using qualitative descriptive analysis. The results showed that the Village Fund Management Process included Planning, Implementation, Administration, Reporting and Accountability. Village Fund Management which is carried out by the Village Government of Ngombol Subdistrict, Purworejo Regency has followed the technical guidance rules that have been regulated in the legislation. but in the process is still not optimal. This can be seen from the programs and activities of community empowerment that have not been optimally budgeted. Factors affecting community empowerment activities through the Village Fund budget program include supporting and inhibiting factors. Supporting factors are community participation, human resources, clear rules and sustainable village funds. The inhibiting factor is the existence of a mindset that has not changed, namely the importance of physical development both by the village government and by the community. This phenomenon causes the need for continuity of the mindset of both the government and the community.

Keywords: community empowerment, village budget

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pembangunan yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensinya atau yang disebut otonomi daerah.

Menurut Usman (2010: 12) pemberdayaan merupakan prioritas utama dalam pembangunan masa depan. Salah satu upaya pembangunan yang harus dilakukan adalah melalui kontribusi riil dari daerah. Kontribusi daerah sangat diharapkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan proses pembangunan dari tingkat dasar atau daerah dan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini dapat menjadi sumber prioritas dari program daerah itu sendiri. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa program pemberdayaan pada suatu daerah memerlukan partisipasi masyarakat yang merupakan hal utama dalam pengelolaan program pemberdayaan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Pius (2013: 2) bahwa kunci keberhasilan dan keberlanjutan program *Feeding Programme in Primary Schools* yang berada di Embarkasi negara Kenya adalah partisipasi dari masyarakat dan juga *stakeholder* dalam mengelola program pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan akan tercapai mengingat keterlibatan yang memadai dari masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama masyarakat yang lemah dalam berpartisipasi, dan kelompok yang terbaikannya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Secara sederhana masyarakat ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dari program pemberdayaan masyarakat. Pada realitanya masyarakat berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan hasil dengan hadir sebagai penerima manfaat ketika pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Dewasa ini program pemberdayaan yang ada pada masyarakat hanya sebagai pelengkap kewajiban pemerintah pusat maupun daerah kepada rakyatnya. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan dimana masyarakat kurang bisa merasakan kebermanfaatannya. Program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan apabila kegiatan program tersebut masih berlangsung dan jika program selesai maka partisipasi masyarakat. Hal ini sering terjadi pada program pemberdayaan masyarakat yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain karena program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat alasan lain tidak maksimalnya program pemberdayaan adalah pembuat kebijakan kurang

memperhatikan kondisi lapangan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan program pemberdayaan masih bersifat gaya lama yaitu kebijakan top-down atau pemerintah memberikan kebijakan berdasarkan analisis pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang bersifat top-down masih kurang tepat sasaran. Masyarakat hanya menjadi objek bukan menjadi subjek pemberdayaan, akibatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih sangat kurang.

Soetomo (2008: 7-8) mengatakan bahwa pembangunan sosial lebih menekankan pada pendekatan proses bukan pada hasil, pendekatan proses yaitu memanusiakan manusia dalam proses pembangunan dengan cara partisipasi masyarakat pada pengelolaannya. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat masih kurang dalam program pemberdayaan yang berorientasikan pada pembangunan sosial yang ada di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan. Pemerintah sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan pada pedesaan melalui program pemberdayaan infrastruktur. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang infrastruktur. Salah satu program yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah bersumber dari Dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat. Dana desa merupakan program pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang berorientasi pada peningkatakan kesejahteraan masyarakat yang berorientasikan partisipasi mental dan fisik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 yang menjelaskan Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program yang bersumber Dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan subjek dalam program pemberdayaan. Besarannya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan akan memberikan efek positif bagi proses dan hasil program pembangunan.

Soetomo (2009: 355) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program akan memberikan dampak positif bagi proses pembangunan masyarakat menjadi tidak tergantung kepada program pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat penting dalam Dana desa karena dinilai turut menunjang keberhasilan program. Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan upaya pemerintah dalam penyaluran Dana desa kepada pemerintah desa untuk mengelola segala potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM).. Namun, yang terpenting dalam pengelolaan sumber daya sumber daya yang ada adalah sumber daya manusianya, karena dengan pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran

ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa pada hakekatnya merupakan terusan program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana Desa (DD), pemerintah berusaha menarik partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat setempat serta dapat memelihara kelangsungan program tersebut sehingga berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap hal penting karena diduga memiliki hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaannya.

Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Masyarakat menjadi subek pemberdayaan bukan hanya objek pemberdayaan semata. Kedudukan sebagai subjek pemberdayaan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama dan kawasan yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pemberdayaan. Kedudukan anggota masyarakat

tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyarakat harus berperan secara aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam menyusun perencanaan maupun dalam implementasi proyek atau program pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa di seluruh Indonesia dengan menggunakan Dana Desa telah berjalan selama 6 (enam) tahun dimulai tahun 2012. Seperti yang telah berjalan bahwa dana desa digunakan oleh desa lebih diutamakan untuk kegiatan fisik infrastruktur, hanya untuk pembangunan-pembangunan fisik semata seperti pembangunan jalan (rabat beton maupun aspal), drainase, jembatan dan lain-lain. Padahal secara aturan bahwa Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat yang dapat menjadikan desa lebih mandiri dan tentunya masyarakat lebih sejahtera.

Proses desentralisasi yang telah berlangsung telah memberikan penyadaran tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun pada saat ini kebijakan yang ada masih menitikberatkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa.

Pemerintah desa memanfaatkan anggaran Dana Desa sebagai sumber daya dana yang akan membiayai program pembangunan desa. Anggaran Dana Desa mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli

maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 yakni pemberdayaan masyarakat yang dijalankan, sebagai perwujudan pemerintah dalam menanggulangi permasalahan yang muncul terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa di masyarakat. Salah satu upayanya adalah menerapkan kerjasama masyarakat melalui program Dana Desa dengan maksud meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa dan kesejahteraan masyarakat yang perlu segera dilaksanakan guna menghindari akibat yang lebih buruk dalam jangka panjang.

Dana Desa diperkuat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh berbagai sektor kementerian dan pemerintah daerah. Pelaksanaannya juga diprioritaskan pada desa-desa miskin. Dengan pengintegrasian berbagai program pemberdayaan masyarakat

ke dalam kerangka kebijakan program, cakupan pembangunannya diharapkan dapat diperluas di daerah-daerah terpencil dan terisolir.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah:

1. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di desanya.
2. Penggunaan Dana Desa yang belum optimal.
3. Pemerintah desa dan masyarakat masih memprioritaskan pembangunan fisik daripada pemberdayaan masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo adalah untuk kelancaran dan mempercepat pembangunan, masyarakat desa selalu meluangkan waktu untuk bergotong royong dan memberikan sumbangan material untuk menambah volume pembangunan yang sangat terbatas. Setelah adanya anggaran Dana Desa atau pembangunan partisipasi masyarakat mulai meningkat dan adanya lapangan kerja bagi yang tidak ada pekerjaan tergantung kemampuan setiap individunya.

Dana Desa di Kecamatan Ngombol tahun 2016-2018.

Tabel 1.1.
Data Dana Desa Kecamatan Ngombol

No	Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)	Keterangan
1.	2016	33.233.948.000,-	
2.	2017	42.360.001.000,-	
3.	2018	37.113.291.000,-	

Sumber : Seksi Ekobang Kecamatan Ngombol, 2018

Dari tabel di atas dipaparkan tentang anggaran Dana Desa yang dari tahun ke tahun yang terus berkelanjutan.

Masyarakat di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo mempunyai jiwa kerjasama dan tolong menolong antar sesama masyarakat sangat tinggi. Sehingga, untuk lebih memberdayakan masyarakatnya sangatlah mudah dan memungkinkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini secara mendalam menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang di biayai oleh Dana Desa.

1.2. Rumusan Masalah

Penggunaan Dana Desa sudah merupakan tahun ke enam, namun kepedulian masyarakat akan pembangunan di desanya masih belum optimal, selain itu juga penggunaan Dana Desa yang masih cenderung untuk pembangunan infrastruktur dan fisik semata belum pada kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1.3.1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Anggaran Dana Desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018?

- 1.3.2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program Anggaran Dana Desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

- 1.4.1. Untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.
- 1.4.2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah ilmu pengetahuan, pada Pendidikan Luar sekolah khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan terutama dalam

bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya pada program
Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya sadar untuk meningkatkan kemampuan atau mengubah suatu kondisi. Hal ini serupa apa yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004: 79) pemberdayaan adalah suatu upaya rangkaian kegiatan untuk membangun masyarakat, dengan cara memberikan suatu dorongan, motivasi agar dapat membangkitkan kesadaran serta mau mengembangkannya potensi yang dimiliki. Sedangkan menurut jurnal penelitian internasional dari Rita Nengsih et.al (2015: 12) yang berjudul "*The Effectiveness Of Urban Independent Community Empowerment Program (PNPM) In Tackling Poverty In Indonesia*" yang mengatakan "*Empowerment is a continuous effort that is done by creating a process that can deliver the poor towards an independent community*" yang berarti Pemberdayaan adalah upaya terus menerus yang

dilakukan dengan membuat sebuah proses yang dapat memberikan miskin menuju masyarakat yang mandiri.

Menurut Suharto (2010: 59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam lingkup masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu perubahan masyarakat yang berdaya, dan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Menurut Usman (2010: 17) memberikan empat pengertian tentang pemberdayaan masyarakat yaitu (1) pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdirinya masyarakat yang mengartikan bahwa masyarakat sebagai objek pemberdayaan bukan sebagai subjek (2) pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang artinya bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (3) pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal yang artinya masyarakat merupakan otak atau penggerak dalam kegiatan sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam melakukan akses kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial politik dengan negara (4) pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktur masyarakat kolektif yang artinya pemberdayaan upaya membuat masyarakat memiliki pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol individu.

Menurut Adisasmita (2006: 35) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (1) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (2) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (3) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi).

Berdasarkan pernyataan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di daerah baik secara sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM), agar tercipta kebermanfaatn dalam

kehidupan sosial dan individu sehingga masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

Menurut Robinson, pemberdayaan adalah suatu proses pribadi dan sosial, suatu pembebasan kemampuan pribadi kompetensi, kreatifitas dan kebebasan bertindak.

Pengertian masyarakat menurut Gillin dan Gilling adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama. Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan secara leksikal adalah berarti penguatan secara teknis. Istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain, pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.

2.1.1. Proses Pemberdayaan Masyarakat

a. Cara-cara Motivasi, Pelatihan Pembinaan dan Evaluasi

1) Cara-cara melakukan motivasi

Motivasi dapat ditimbulkan dengan cara membuat rancangan kerja yang memungkinkan seorang pegawai bersedia melakukan kearah itu. Untuk itu rancangan kerja sebaiknya memuat cirri-ciri: simplikasi, standarisasi, dan spesialisasi. Rancangan pegawai yang memuat ciri-ciri tersebut mampu meningkatkan motivasi pegawai.

Motivasi dapat ditimbulkan melalui rancangan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik adalah bersifat simplikasi, maksudnya adalah rancangan kerja harus mempunyai nilai implikasi (pelaksanaan) yang mendekati dengan kondisi kerja

yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus bersifat standarisasi, maksudnya ada nilai setandar yang ditetapkan, ukuran standarisasi ini tidak akan sama bahkan cenderung berbeda antara satu perusahaan atau organisasi dengan perusahaan atau organisasi yang lain. Rancangan kerja juga harus bersifat spesialisasi, maksudnya membuat satu model rancangan kerja dengan melakukan pemilihan antara satu karyawan yang lain disesuaikan dengan jabatannya dalam suatu perusahaan.

Huckman dan Oldman sebagaimana (Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2012) juga menyajikan tantangan yang cukup berarti mengenai pendekatan historis dalam desain pegawai, karena pegawai publik jarang menerima *ekstrinsic reward* yang memadai, maka metode pembuatan desain dalam membangun *intrinsic reward* patut memperoleh perhatian.

Metode pembuatan desain pegawai mutlak melalui pendekatan historis, artinya dengan melihat kenyataan-kenyataan dilapangan terutama yang berhubungan dengan imbalan luar seperti bonus dan intensip.

2) Cara-cara melakukan pelatihan dan pembinaan

Program latihan mempunyai tiga tahapan aktivitas, yaitu:

- a) Penilaian kebutuhan pelatihan (*need assesment*), yang tujuannya adalah mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan.
- b) Pengembangan program pelatihan (*development*), bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan.
- c) Evaluasi program pelatihan (*evaluation*), yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program pelatihan yang telah dijalani, secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penentuan kebutuhan pelatihan memerlukan tiga tipe analisis, yaitu analisis organisasional, analisis operasional, dan analisis personal.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengembangan pegawai melalui pelatihan, berikut ini dikemukakan beberapa metode pelatihan, diantaranya menurut Jucius (dalam Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosish, 2012), sebagai berikut:

- a) *On The Job Teraining* (pelatihan ditempat kerja), metode ini menyarankan perlunya pelatihan pada tenaga kerja baru.
- b) *Vestibule Teraining*, pelatihan ini berupa kursus singkat yang direkayasa sehingga kondisi dan fasilitas kursus mendekati situasi kerja yang sebenarnya.

- c) *Apprenticeship Training*, maksudnya adalah pegawai baru yang dimagangkan ada seseorang yang ahli dalam bidang tertentu.
- d) *Internship Training*, program pelatihan yang dilakukan sebuah lembaga pendidikan dengan instansi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah untuk memberikan latihan kepada siswa atau mahasiswa.
- e) *Learner Training*, kadang-kadang perusahaan diharapkan dengan permasalahan banyaknya tumpukan tugas yang perlu segera diselesaikan, sedangkan jenis pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja setengah terampil dalam jangka pendek, maka dari itu perusahaan mengirimkan sejumlah tenaga kerja yang ada untuk mengikuti pelatihan pada sebuah sekolah pada kejuruan tertentu.
- f) *Outside course*, merupakan metode pelatihan yang dilakukan oleh suatu lembaga profesional bekerjasama dengan suatu perusahaan tertentu.
- g) *Retraining and upgrading*, metode pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterampilan pegawai baru untuk mengantisipasi kondisi lingkungan yang senantiasa berubah dan berkembang.

Pelatihan dan pembinaan pegawai dapat dilakukan melalui metode-metode tersebut. Pelaksanaan model-model pelatihan ini disesuaikan dengan kondisi dan situasi pegawai yang bersangkutan. Adapun pendekatan pelatihan menggunakan empat pendekatan yaitu: pendidikan formal, perkiraan ataupun penilaian, pengalaman kerja dan hubungan antar pribadi.

Pendekatan pelatihan dimaksudkan agar metode yang dipilih dapat disesuaikan dengan karakteristik diri peserta pelatihan, pendekatan pelatihan yang dapat digunakan adalah pendidikan formal, perkiraan ataupun penilaian, pengalaman kerja dan hubungan antar pribadi.

3) Cara-cara melakukan evaluasi

Dalam tahapan evaluasi program, ditentukan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Evaluasi menjadikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan. Evaluasi baru dapat dilaksanakan kalau rencana sudah dilaksanakan. Namun demikian, perencanaan yang baik harus sudah dapat menggambarkan proses evaluasi yang akan dilaksanakan.

- a) Bertindak bersama yaitu tidak hanya sekedar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- b) Memberikan dukungan yaitu dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

2.1.2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan (Sumaryadi, 2005:11). Berikut penjelasannya:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-

laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.

c. Keswadayaan atau kemandirian

Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

Bantuan dari orang lain yang bersifat materiil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.

2.1.3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan menjelaskan bahwa proses pemberdayaan ada dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan

kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses pemberdayaan masyarakat kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok dimana anggota bekerja sama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan yang disusun secara sistematis dan merupakan proses kegiatan yang diulang terus menerus. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Pemberdayaan dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

a. Pemberdayaan sebagai sebuah proses

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

b. Pemberdayaan sebagai sebuah tujuan

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Strategi yang merupakan bagian penting dalam proses pengembangan tentunya menjadi pijakan atas langkah-langkah yang akan dijalani demi kelancaran program.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata 'stragos' atau 'strategis' dengan kata jamak strategi yang berarti jenderal, tetapi dalam Yunani kuno berarti perwira Negara dengan fungsi yang jelas. Sedangkan secara epistemologi strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Menurut Rudi (2015) ada tiga dasar di dalam menyusun kegiatan untuk mengembangkan, masyarakat yaitu:

- 1) Strategi empiris rasional yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa manusia adalah kebodohan dan takhyul.

Manusia akan mengikuti akan kepentingan dirinya sendiri yang rasional. Manusia akan menerima perubahan jika perubahan itu dapat diterima dan dibenarkan secara rasional.

- 2) Strategi non reducatif yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi-asumsi bahwa pola tindakan dan perilaku masyarakat didukung oleh norma-norma sosial budaya dan komitmen individu oleh sikap dan norma-norma.
- 3) Strategi kekuatan paksaan yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia akan mengikuti keinginan dari pihak lain yang dipandang memiliki kekuasaan yang lebih besar pemenuhan kebutuhannya berada pada pihak tersebut. Masyarakat yang memiliki tingkat intelektual rendah dan situasi masyarakat yang anomi menurut peran yang lebih besar dari pengusaha untuk melakukan inisiatif dan pengaturan.

2.1.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Masyarakat

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah:

- a. Adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM.
- b. Adanya teknologi tepat guna yang telah dikembangkan di pedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunan.
- c. Adanya proyek bantuan pemerintah
- d. Adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan didesa.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah: adanya program pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM, adanya asset pembangunan berupa sumberdaya alam yang perlu ditingkatkan pemanfaatannya, adanya teknologi tepat guna yang telah

dikembangkan di pedesaan dan berhasil meningkatkan hasil pembangunannya, adanya proyek bantuan pemerintah, dan adanya lembaga-lembaga desa yang membantu pelaksanaan pembangunan di desa.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa adalah:

- a. Adanya perbedaan kemajuan antar kelompok masyarakat dalam arti ada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.
- b. Belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan dalam masyarakat.
- c. Belum terjadi pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah dalam pembangunan.
- d. Kurangnya sumberdaya manusia (SDM) yang mampu merencanakan dan mempola pembangunan.
- e. Perbedaan budaya, agama, kebiasaan, tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat.
- f. Adanya perbedaan pola pikir/tingkat pendidikan dalam masyarakat.

Dengan demikian faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat adalah adanya perbedaan antar kemajuan kelompok masyarakat, belum adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan, belum terjadinya pemerataan hasil-hasil dan bantuan-bantuan pemerintah, kurangnya sumberdaya manusia yang mampu merencanakan pembangunan, perbedaan budaya, agama,

kebiasaan, tingkat kemajuan ekonomi dalam masyarakat dan adanya perbedaan pola pikir/tingkat pendidikan dalam masyarakat.

2.2. Teori Program Dana Desa

Program dana desa mulai pada tahun 2012 hingga sekarang. Hampir di setiap desa mempunyai kesibukan dengan proyek pembangunan yang ada dan menjalankan proyek jalan utama desa, parit disisi jalan desa ataupun sampai pelosok jalan-jalan dusun semuanya disibukkan dengan proyek pembangunan.

Konsep tentang kurangnya partisipasi masyarakat mulai dari keikutsertaan masyarakat dalam berbagai program yang ada dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah, sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi (kemiskinan struktural). Dengan pengertian ini, maka masyarakat masuk dalam kategori kemalasan masyarakat dalam berpartisipasi. Ini yang sering disebut dengan kurangnya partisipasi dalam masyarakat. Definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator kurangnya partisipasi dalam diri masyarakat dan tidak cukup untuk memahami realitas masyarakat untuk dapat menanggulangi partisipasi masyarakat.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji masalah penggunaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, beberapa penelitian lainnya masih memiliki hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya.

2.3.1. Penelitian Faizatul Karimah dkk

Penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Desa, diantaranya penelitian Faizatul Karimah, choirul shaleh dan ike wanusmawatie (2013), yang meneliti tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus di perbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme

penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban sampai pada transparansi anggaran. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia.

2.3.2. Penelitian Boedijono dkk

Berdasarkan penelitian Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Shandika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani (2019) dalam Jurnal Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa serta efektifitas pengelolaan dana desa guna pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini dilakukan pada tiga kecamatan di wilayah Kabupaten Bondowoso, yaitu Kecamatan Curahdami, Wonoasri, dan Tenggarang. Metode penelitian ini merupakan gabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah secara umum desa yang berada di Kabupaten Bondowoso telah melakukan pengelolaan keuangan desa secara baik, namun pada hal tertentu masih belum tertib dalam administrasi, sehingga terkadang mengalami keterlambatan dalam pencairan keuangan desa untuk periode berikutnya.

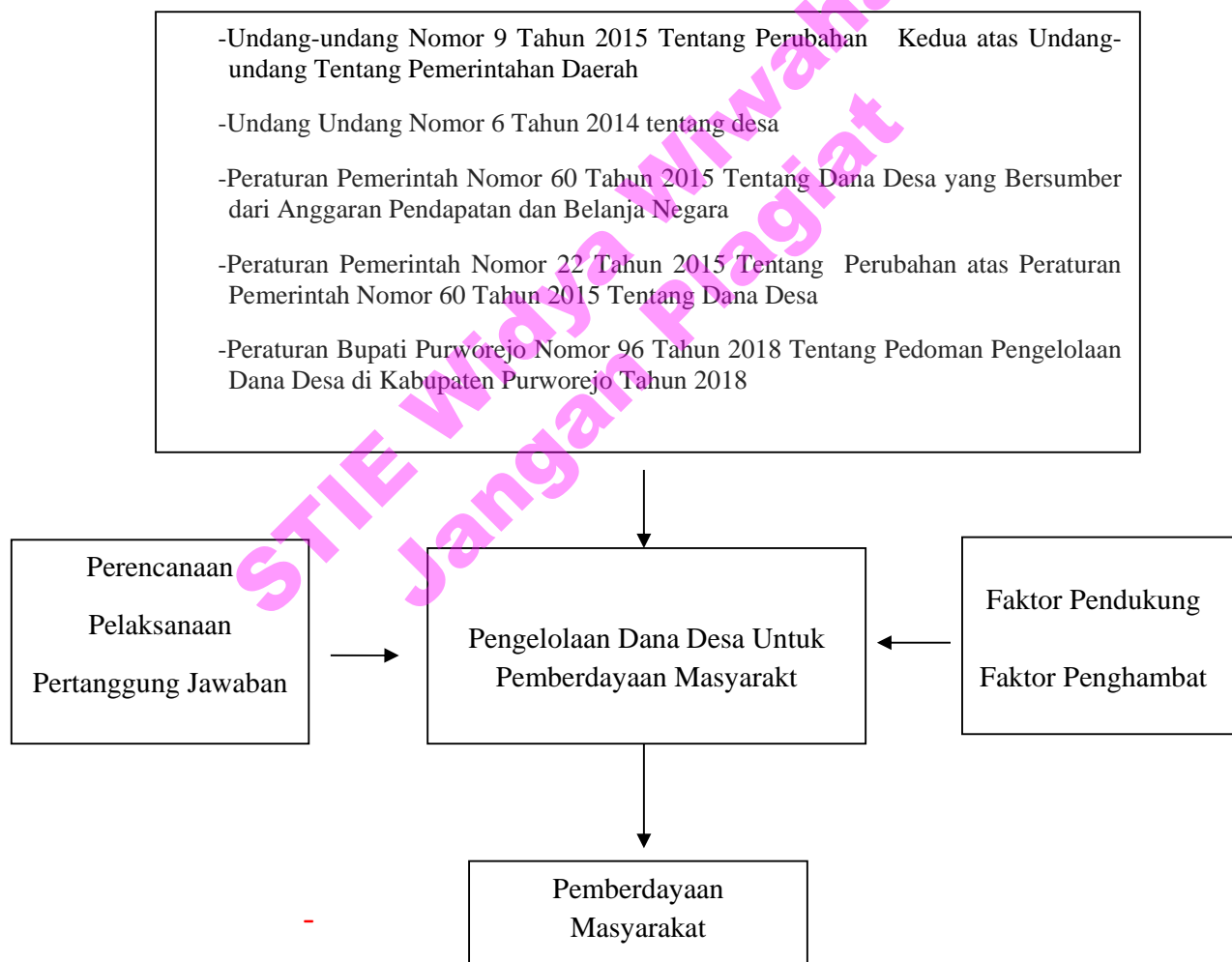
2.3.3. Penelitian Monica Meiva Rorong dkk

Penelitian lain dilaksanakan oleh Monica Meiva Rorong, Arie Junus Rorong, dan Very Y Londa (2017) dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Walewangko Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Untuk mewujudkan atau meningkatkan dimensi-dimensi keberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan ADD maka Pemerintah meningkatkan besar Alokasi Dana Desa untuk setiap desa, sehingga pemerintah desa dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan menjangkau banyak masyarakat kecil/kurang mampu. Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Walewangko banyak dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.4. Kerangka Penelitian

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat maupun daerah melalui program pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada agar tercipta kesejahteraan sosial. Pembangunan Nasional tersebut diimplementasikan dengan program pemberdayaan melalui Anggaran Dana Desa. Namun kenyataannya program pemberdayaan yang di kelola pemerintah mengalami banyak permasalahan. Permasalahan ini terjadi karena faktor dari dalam pemerintah dan masyarakat yang lebih mengutamakan kegiatan fisik dari pada pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan

masyarakat dan pelaksanaan program yang kurang maksimal. Selain itu akibat akibat dari permasalahan implementasi program yang tidak maksimal membuat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga rendah. Hakikat dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bersumber Dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat sehingga menjadi mandiri. Secara singkat kerangka berfikir akan di gambarkan pada bagan di bawah ini :



Gambar 2.1.

Kerangka Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

3.1.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya untuk menemukan realitas apa yang tengah terjadi mengenai masalah tertentu. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada pengumpulan data lapangan yang berhubungan dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses pemberdayaan yang dibiayai oleh anggaran dana desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

3.1.2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu membuat deskripsi/gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Menurut Irawan Soehartono penelitian yang bersifat deskriptif ialah penelitian yang menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu.

Penelitian yang sifatnya deskriptif, mengungkapkan data-data, uraian yang berbentuk kalimat pertanyaan yang diperoleh dari anggota, pengurus anggaran dana desa melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan sebagainya. Tentang bentuk dan faktor-faktor

pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dalam program pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah subjek yang diteliti, populasi disebut juga univers tidak lain dari daerah generalisasi yang diwakili oleh sampel Populasi dalam penelitian yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 terdiri dari:

- a. Aparat Desa Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.
- b. Tenaga verifikasi dari kecamatan 1 orang.
- c. Tenaga pendamping dari kelompok masyarakat yang ditunjuk sebagai ketua koordinator 1 orang.
- d. Masyarakat Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dalam peneltian berjudul pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018 adalah sebanyak 4 tokoh masyarakat.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel ini juga merupakan informan atau sumber informasi. Untuk penetapan sampel menggunakan teknik *non-random sampling*

yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya, teknik *non-random sampling* digunakan jenis *snowball sampling* merupakan salah satu metode dalam pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik *non-probability sampling* (sampel dengan probabilitas yang tidak sama).

Kriteria atau ciri-ciri dari populasi yang dijadikan sampel sebagai berikut:

- a. Aparat desa yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.
- b. Tenaga penyuluh atau pendamping kecamatan.
- c. Tenaga pendamping internal atau masyarakat.
- d. Tokoh masyarakat desa.

Berdasarkan kriteria di atas populasi dari anggota kelompok pemberdayaan yang memenuhi syarat dijadikan sampel adalah 8 orang pengelola Dana Desa, 4 orang kepala desa dan 4 orang tokoh masyarakat anggota kelompok pemberdayaan. Guna melengkapi data penelitian, penulis mengambil informan 2 orang, yaitu dari Pendamping Desa 1 orang dan 1 orang verifikator di Kecamatan Ngombol, jadi keseluruhan sampel 18 orang.

3.3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data lapangan, maka metode pengumpulan data sebagai berikut:

3.3.1. Metode interview

Interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual (Malhotra, 2004). Metode interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pada prinsipnya sama dengan metode angket.

Perbedaannya pada angket, pertanyaan diajukan secara tertulis, sedangkan pada wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan. Dalam wawancara, alat pengumpulan datanya disebut pedoman wawancara. Suatu pedoman wawancara, tentu saja harus benar-benar dapat dimengerti oleh pengumpul data, sebab dialah yang akan menanyakan dan menjelaskan kepada responden. Interview dibutuhkan agar data dapat diperoleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Interview ini diajukan kepada pengelola yang bekerja yang menjadi sampel.

3.3.2. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ada. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap dan meraba termasuk salah satu bentuk dari observasi.

Metode observasi adalah sebagai metode untuk melengkapi data-data yang tidak bisa digali melalui interview dan dokumentasi.

Metode observasi digunakan untuk mengamati kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan Dana Desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

3.3.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaannya. Maksud mengumpulkan dokumen adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti berbagai faktor disekitar subjek penelitian. Dokumentasi adalah pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dan hasil dokumentasi ini akan menjadi sangat akurat dan sangat kuat dukungannya.

Dokumentasi adalah salah satu metode dalam pengumpulan data, yang berbentuk catatan, buku gambar, laporan dan dokumen lainnya dari masyarakat, instansi maupun organisasi tertentu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang bersifat dokumen, dan berkaitan dengan keadaan Dana Desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

3.4. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tindakan mengolah data hingga menjadi sebuah informasi, yang bermanfaat dalam riset. Analisis secara kualitatif bersifat memaparkan secara mendalam hasil riset melalui

pendekatan bukan angka atau nonstatistik. Data analisis kualitatif berarti menarik sebuah makna, dari serangkaian data mentah menjadi sebuah data interpretasi dari penelitian dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dalam analisis kualitatif ini, data-datanya bersifat atau berbentuk kata-kata tidak berupa rangkaian angka. Data ini hanya berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun data yang dimaksud adalah penelitian lapangan telah mengumpulkan informasi dalam bentuk catatan yang ditulis maupun hanya sebagai memori atau bahkan rekaman audio tentang peristiwa penelitian.

Data lapangan yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa, kemudian data itu dikumpulkan dan dipilih berdasarkan mana yang lebih penting dahulu yang akan dipelajari. Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya menganalisis data tersebut, kemudian memaparkan menjadi informasi yang akurat yang diperoleh dari masyarakat di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018 dengan aparatur desa yang berkaitan dengan Anggaran Dana Desa dengan kesejahteraan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu pemberdayaan masyarakat melalui program anggaran dana desa di Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo Tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Ambar, Teguh Sulistiyani dan Rosidah. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Malhotra, N.K, 2004. *Riset Pemasaran, Pendekatan Terapan. Edisi Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Robinson, B dan Hanna, MG.1994. *Strategies For Community Empowerment : Direct Action and Trassformative Approach to Social Change Practice*. New York : The Edwin Mellen Press.
- Rudy Badrudin. 2015. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Soetomo.2008. *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Soetomo.2009. *Pembangunan Masyarakat Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soetomo.2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. . Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi.2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : Refika Aditama.
- Suhartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sumaryadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta; CIRED.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang *Dana Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015*.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo*.

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 96 Tahun 2018 Tentang *Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Purworejo Tahun 2018*.

Jurnal

Boedijono, Galih Wicaksono, Yeni Puspita, Shandika Cipta Bidari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso*.

Faizatul Karimah, Choirul Saeleh, Ike Wanusmawati. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pmberdayaan masyarakat*.

Monica Meiva Rorong, Arie Junus Rongrong, Veny Y Londa. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa*.